

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PRINGSEWU  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS  
MASYARAKAT 2023**

**(Studi di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten  
Pringsewu)**

**(Skripsi )**

**Oleh**

**Nama : Rendy Gustanto  
NPM : 1746021027**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

Oleh :

**Rendy Gustanto**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam sistem pengelolaan perkotaan adalah pengelolaan sampah yang belum optimal, Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena hampir setiap kegiatan fisik yang dilakukan manusia pada akhirnya akan menimbulkan sampah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman padat penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui Teori Peran, terdiri dari peran pengatur kebijakan dan peran penyediaan layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Podomoro dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi aspek peran, Adapun faktor peran pengatur kebijakan adalah dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta indikator berupa pelaksanaan peran pembinaan dalam bentuk sosialisasi bahaya dan manfaat sampah, pelaksanaan peran pengawasan berkerjasama dengan pihak desa Podomoro, sedangkan dalam peran penyediaan layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu membangun tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu memberikan bantuan tiga unit kendaraan pengangkut sampah, namun hanya tempat pembuangan sampah sementara tidak disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu.

***Kata Kunci : Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat, Teori Peran, Peran Pengatur Kebijakan, Peran penyedia layanan.***

**ABSTRACT****By :*****Rendy Gustanto***

*One of the problems faced by the Pringsewu Regency Government in the urban management system is waste management that is not yet optimal. Garbage is an inseparable part of human life, because almost every physical activity carried out by humans will eventually generate waste, especially for people who live in densely populated residential areas. This study aims to determine the implementation of the role of the pringsewu regency environmental service in community-based household waste management through role theory consisting of the role of policy maker and the role of service provider. This research uses descriptive methods with a qualitative approach, determining informants using purposive sampling techniques. The results of this study indicate that the Implementation of the role of the pringsewu regency environmental service in community-based waste management in podomoro village can be said to be successful in fulfilling role aspects, the policy regulatory role factors with the cities without slums (KOTAKU) program, as well as indicators in the form of implementation of the coaching role in the form socialization of the dangers and benefits of waste implementing the supervisory role in collaboration with podomoro village, while in the service provision role the pringsewu regency environmental service built an integrated waste management site (TPST), besides that the Pringsewu regency environmental service provided assistance three units of garbage collection vehicles, but only a temporary garbage disposal site was not provided by the Pringsewu Regency Environmental Service.*

**Keywords:** *Community-based Waste Management, Role Theory, Role of Policy Manager, Role of service providers.*

Judul Skripsi : PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
BERBASIS MASYARAKAT 2023 (Studi di Desa  
Podomoro, Kecamatan Pringsewu Selatan,  
Kabupaten Pringsewu)

Nama Mahasiswa : Rendy Gustanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 1746021027

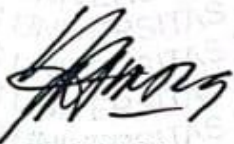
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.**  
NIP. 196112181989021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

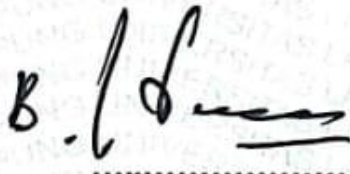
  
**Drs. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP. 196112181989021001



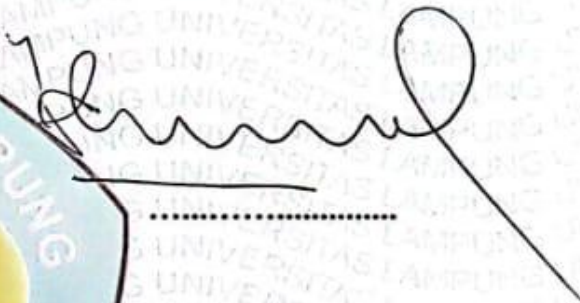
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP**



Penguji : **Dr. Syarief Makhya, M.Si**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 September 2023.

## PERNYATAAN

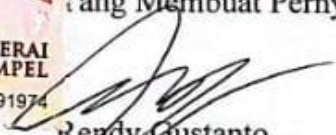
Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.



Bandar Lampung, 29 September 2023

Yang Membuat Pernyataan

  
Rendy Gustanto  
NPM. 1746021027

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rendy Gustanto, dilahirkan di Pajaresuk yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra Pertama dari pasangan Bapak Suwoto dan Ibu Hernita. Jenjang Pendidikan Penulis dimulai dari SDN 02 Babakan pada tahun 2006-2011. Setelah lulus, penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Pardasuka pada tahun 2011-2014 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Yadika Pagelaran pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017, Penulis melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi dengan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal Program S1 Pararel Tahun 2017.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri Penulis. Penulis bergabung pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai Kominfo. Selanjutnya Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2020 di Desa Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

**MOTTO**

“Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan.”

**(Al-Insyirah: 5-6)**

“Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. namun jika dia tidak kembali, ketahuilah, dia bukan milikmu”

**(Ali Bin Abi Thalib)**

“Jangan Merubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu. Hebahtkan dirimu agar mau tidak mau mereka harus menerimamu “

**(Rendy Gustanto)**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar  
hambaMu,

Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan  
Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang  
selalu dinantikan syafa'atnya di *Yaumul Akhir*

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Bapak Tercinta

**Hernita dan Suwoto**

Serta Adikku

**Thomas oranda**

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi  
ini. Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT 2023 (Studi di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu)**. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh Gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membant dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku dosen pembimbing, terimakasih bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis membuat skripsi ini dengan sebaiknya-baiknya;
5. Bapak Dr Syarief Makhya, M.Si., selaku Dosen Penguji, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;

6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis membuat skripsi ini dengan sebaiknya-baiknya;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tua ku, Bapak Suwoto dan Ibu Hernita yang selalu menyertai Langkah ku dengan doa, menjaga dengan penuh kasih sayang, menuntun dengan sabar, mengorbankan segala hal dengan sepenuh hati untuk membesarkan dan mewujudkan mimpi-mimpi ku;
9. Kepada adikku ku Thomas Oranda terimakasih senantiasa menyertai langkah ku dengan doa, memberikan dorongan, dukungan dan semangat. Semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan dapat tercapai;
10. Kepada Informan Peneliti, bapak Suprio selaku kepala desa Podomoro, Bapak muhamad husin selaku Sekretaris Desa podomoro, Bapak Junaidi selaku Kaur TU Desa podomoro dan syahrizal selaku Kasi Pelayanan Desa podomoro, saya ucapkan terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dan tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan memperoleh informasi untuk mendapatkan hasil wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Aamiin;
11. Kepada seluruh Aparatur Desa Babakan, terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang kalian berikan Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Kepada Teman saya di Kampung Satria Anhar, yudha saputra, ibramsyah, Anggi Arya Pratama, Terimakasih sudah menemani, memberikan dukungan dan menjadi sahabat yang baik ketika dalam keadaan susah dan senang. Semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan dipermudah oleh Allah SWT;

13. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan 2017, dan juga teman-teman KKN saya di Desa Babakan, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kepada Megis deselpan, Salma, Sukma, Popi dan Rosita terimakasih telah, memberikan pengalaman dan pelajaran baru di hidup saya sewaktu kuliah kerja nyata;
14. Rekan-rekan PMII, Yang selalu memberikan ide dan gagasannya terkhusus bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan;
15. Teman Seperjuangan Alan Aska Nicola, Vio Malfino ashari, Imbang Kurniawan, Ridho Handika, Yogie Murti Pratama, Evando Yulisa, Defri Pahlefi Amin. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis.
16. Kepada Pacar saya Tercinta Amalia Alfi Sapta Rengga, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi saya;
17. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;
18. Dan juga terimakasih kepada diri saya sendiri, Rendy Gustanto. Yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini dan tidak menyerah. Setelah ini harus bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang;

Bandar Lampung, 29 September 2023

Penulis,

Rendy Gustanto





<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>49</b>
4.1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu .....	49
4.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	49
4.1.2	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3.....	51
4.1.3	Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup .....	54
4.2	Desa Podomoro .....	56
4.2.1	Kondisi Desa .....	56
4.2.2	Sejarah Desa.....	57
4.2.3	Demografi.....	59
4.2.4	Tingkat Pendidikan .....	59
4.2.5	Kelembagaan Desa.....	60
4.2.6	Mata Pencaharian .....	61
4.2.7	Struktur Organisasi.....	62
4.3	Kabupaten Pringsewu.....	63
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	64
5.2	Peran Pengatur Kebijakan. ....	64
5.2.1	Pelaksanaan Peran pembinaan .....	67
5.2.2	Pelaksanaan Peran Pengawasan .....	71
5.3	Peran Penyedia Layanan .....	73
5.3.1	ketersedian tempat pembuangan sampah sementara 75	
5.3.2	ketersedian kendaraan pengangkut sampah .....	76
5.3.3	ketersedian tempat pengelolan sampah .....	77
5.4	Analisis dan Pembahasan .....	82
5.4.1	Analisis Peran Pembuat Kebijakan .....	82
5.4.2	Analisis Peran Pembinaan .....	83
5.4.3	Analisis Peran Pengawasan .....	85
5.4.4	Analisis Peran Penyedia Layanan .....	86
<b>VI.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
6.1	Simpulan.....	89
6.2	Saran.....	90
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. Informan Penelitian.....	43
Tabel 3. Jumlah Pegawai di DLH Berdasarkan jenis kelamin... ..	55
Tabel 4. Jumlah Pegawai di DLH Berdasarkan Golongan.....	56
Tabel 5. Jumlah Penduduk... ..	59
Tabel 6. Tingkat Pendidikan. ....	60
Tabel 7. Indikator Keberhasilan DLH dalam Pengatur Kebijakan .....	73
Tabel 8. Tempat Pembuangan Sampah Mandiri Oleh Masyarakat.....	76
Tabel 9. Indikator Keberhasilan DLH dalam Penyedia layanan.....	79

## DAFTAR GAMBAR

Halaman	Gambar 1. Buku Tabungan Bank Sampah Jejama Seancanan .....	4
	Gambar 2. Teknis Operasional Pengelolaan Sampah .....	22
	Gambar 3. Pola Pemungutan Sampah Individual Tak Langsung.....	23
	Gambar 4. Pola Pengumpulan Sampah Komunal .....	23
	Gambar 5. Bagan Kerangka Pikir .....	40
	Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Lingkugnan Hidup .....	50
	Gambar 7. Struktur Organisasi Desa Podomoro... ..	62
	Gambar 8. Peresmian TPST Desa Podomoro Oleh bupati Pringsewu.....	67
	Gambar 9. Sosialisasi Oleh DLH di Desa Podomoro .....	70
	Gambar 10. Pengawasan Oleh aparaturnya Desa Podomoro.....	72
	Gambar 11. Kotak Sampah Mandiri Oleh Masyarakat Terbuat Dari Kayu.....	76
	Gambar 12. Kotak Sampah Mandiri Oleh Masyarakat Terbuat Dari Bambu.....	77
	Gambar 13. Kotak Sampah Mandiri Oleh Masyarakat Terbuat Dari Drum Plastik.....	77
	Gambar 14. Kotak Sampah Mandiri Oleh Masyarakat Terbuat Dari Bak Semen	78
	Gambar 15. Kendaraan Pengangkut Sampah di Desa Podomoro .....	78
	Gambar 16. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu .....	79
	Gambar 17. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu .....	83
	Gambar 18. Sosialisasi Oleh DLH Pringsewu di Desa Podomoro .....	84
	Gambar 19. Pengawasan Oleh Aparatur Desa Podomoro .....	86
	Gambar 20. Kendaraan Pengangkut Sampah.....	87
	Gambar 21. TPST Desa Podomoro .....	88

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu masalah lingkungan yang dihadapi Kabupaten Pringsewu adalah masalah sampah. Meningkatnya volume sampah yang tidak dibarengi dengan kemampuan pengelolaan pemerintah daerah menyebabkan terjadinya pemusatan sampah sembarangan di berbagai tempat. Padahal, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengurangan dan pengelolaan sampah sebagai bentuk perlindungan lingkungan. Upaya Pemprov Pringsewu membuahkan hasil dengan diterbitkannya Perda Edisi 3 Tahun 2016 tentang Sampah yang salah satunya mengatur tentang pengelolaan TPA.

Masalah sampah timbul seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat kurangnya pengelolaan sampah. Sampah menurut asalnya terbagi menjadi 3 jenis yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya) dengan karakteristik yang berbeda seperti sampah organik yang merupakan sampah basah organisme, sampah anorganik, dll. Sampah organik merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara alami dan Limbah B3 merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan (Pratiwi,2019).

Kabupaten Pringsewu terletak di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk 405.466 jiwa dengan luas wilayah 625 kilometer persegi (BPS, 2020). Pemerintah Daerah Pringsewu telah menerbitkan Peraturan Daerah Pringsewu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Masalah sampah di Kabupaten Pringsewu cukup memprihatinkan karena menimbulkan permukiman kumuh dan banjir saat musim hujan. Akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat, yang dilakukan hanya untuk

mengubah sampah plastik menjadi bentuk baru dan tidak mengurangi volume sampah, diperlukan alternatif selain (3R+P) yaitu mengurangi

“reduce pile”. sampah pada sumbernya", reuse "memanfaatkan kembali barang/limbah yang tidak perlu", mendaur ulang "mendaur ulang barang/limbah agar memiliki nilai ekonomis". Pemkab dengan membangun tiga TPS3R yang berlokasi di Pringsewu Utara, Pringsewu Selatan dan Pringsewu Barat.

Sampah yang paling dominan adalah sampah rumah tangga sebesar 48%, dibandingkan sampah pasar tradisional 24% dan sampah komersial 9%. Sedangkan sisanya berasal dari fasilitas umum, sekolah, perkantoran, jalan, dll. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang paling efektif adalah keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pengelolaan sampah, dimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak dibatasi. terbatas pada pengelolaan sampah tetapi juga berperan dalam minimisasi sampah.

Berdasarkan hukum bilangan. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 19 menetapkan bahwa “pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis meliputi pengurangan dan pengolahan sampah” (Rafiqi, 2017). Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (4) mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah, masyarakat dapat menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan mudah terurai oleh proses alam. Artinya peran serta masyarakat dalam mengurangi penggunaan sampah, terutama sampah yang sulit didaur ulang.

Penting untuk pengelolaan limbah, terutama karena sebagian besar limbah berasal dari limbah rumah tangga yang perlu diminimalkan. Namun untuk pengelolaan sampah yang efektif, partisipasi masyarakat yang paling diperlukan tidak hanya sekedar memberikan usulan atau usulan terkait pengelolaan sampah, tetapi juga dalam hal menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyepakati “pengelolaan awal” sampah masing-masing.



Limbah rumah tangga atau pribadi (Sembiring, et al., 2018; Dongoran, et al., 2018; Sari & Syafruddin, 2016; Santifa, et al., 2019). Hal ini karena sebagian besar masalah sampah justru muncul dari kesalahan “penanganan awal”, yaitu pembuangan pertama setelah suatu barang atau barang dianggap tidak perlu sehingga menjadi sampah. Selama proses pengolahan awal, banyak warga yang membuang sampah di pinggir jalan atau di selokan. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah dengan benar seringkali menimbulkan masalah sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih rumit (Suyono & Kadir, 2014).

Sistem pengelolaan sampah masyarakat dapat diimplementasikan dengan mengoperasikan sistem bank sampah. Tujuannya adalah untuk membuang sampah sesegera mungkin dengan melibatkan masyarakat. Penerapan sistem bank sampah diharapkan dapat lebih memberikan dorongan kepada masyarakat sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat yang menganggap sampah sebagai komoditas yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bernilai jual (Pratama et al., 2019). Pringsewu telah mendapatkan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di desa Pringsewu Barat, Pringsewu Utara dan Pringsewu Selatan dengan harapan dapat secara serius mengurangi permasalahan pengelolaan dengan adanya master plan di TPA Pekon Bimiayu, agar sampah dapat diolah dengan nilai ekonomi” (Lampung, 2020).

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian PUPR dalam bentuk Kotaku dengan tujuan mendorong dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku pembangunan. Diawali dengan pembangunan kawasan kumuh Sakai-Sambaiyan yang meliputi lima lokasi yakni di Kecamatan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu Utara, Desa Podomoro dan Desa Sidoharjo dengan anggaran tahun 2020-2021 adalah Rp 25,83 miliar (Kompas, 2021).

Bank Sampah Jejama Secancangan didirikan oleh Pemerintah Daerah Pringsewu bersama masyarakat yang peduli terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah. Bank Sampah Jejama Secancangan menerapkan ide awal mengumpulkan sampah dari pemukiman penduduk dengan gerobak dorong. Direktur bank sampah Jejama Secancangan mengatakan “proses awal yang kami lakukan menggunakan gerobak dorong untuk memungut sampah dari rumah warga, awalnya ada 20 rumah tangga pemilik”. Selama proses pengumpulan sampah, anggota bank sampah memisahkan sampah kering dan basah. Apakah ini efektif? Seiring waktu, masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan sampah kering dari rumah dan kemudian mengunjungi TPA Jejama Secancangan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak membuang sampah sembarangan dengan cara mencari nafkah penghematan limbah. Di bawah ini merupakan buku tabungan warga yang sudah menjadi nasabah dari bank sampah Jejama Secancangan.



**Gambar 1. Buku tabungan bank sampah jejama secancangan**

Buku tabungan tersebut dimiliki masyarakat/warga secara perseorangan sebagai nasabah. Setiap sampah yang disetorkan memiliki harga, harga barang-barang tersebut ditentukan oleh pihak bank sampah Jejama Secancangan

Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan. Sebagai upaya menggugah kepedulian dalam penanganan permasalahan lingkungan, khususnya persampahan serta untuk menciptakan kualitas lingkungan pemukiman yang bersih dan ramah lingkungan maka, harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah dengan cara :

1. Pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan pemilihan, atau pemrosesan dengan teknologi yang sederhana seperti komposting dengan skala rumah tangga atau skala lingkungan.
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di koordinir oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM), kelompok ini bertugas mengkoordinir pengelolaan kebersihan lingkungan.

Sampah dapat dikategorikan menurut sumbernya, yang secara umum terdiri dari sampah industri, sampah pemerintah, dan sampah rumah tangga. Limbah industri dihasilkan dari kegiatan industri dan dapat berupa residu dari bahan baku dan limbah dari pekerja. Sampah pemerintah meliputi sampah dari kantor dan fasilitas umum yang dikuasai pemerintah. Sedangkan sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh keluarga yang tinggal di pemukiman dan asrama. Jenis sampah rumah tangga biasanya organik, seperti sisa makanan, sampah basah, sampah kering, dan sampah plastik. Menurut rasio Ridho Sani, MCOM, MPM selaku Wakil IV Pengelolaan Barang Berbahaya dan Beracun, sebagian besar sampah Indonesia berasal dari rumah tangga. Jumlah sampah yang

paling dominan adalah , dibandingkan dengan 48% untuk sampah rumah tangga, 24% untuk sampah pasar tradisional, dan 9,% untuk sampah komersial. Sisanya berasal dari lembaga publik, sekolah, perkantoran, jalanan dan lainnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang paling efektif adalah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan sampah. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan membantu tidak hanya pengelolaan sampah, tetapi juga pengurangan sampah.

Berdasarkan UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 19 menyatakan bahwa “pengelolaan sampah domestik dan sampah rumah tangga lainnya” adalah mengurangi sampah dan mengolahnya” (Rafiqi, 2017). Tapi sebaliknya Pasal 20 ayat (4) mengatur bahwa masyarakat pada saat melakukan kegiatan minimasi sampah dapat menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan/atau mudah terurai oleh proses alam. Artinya peran masyarakat dalam mengurangi penggunaan sampah, terutama sampah yang sulit didaur ulang penting untuk pengelolaan limbah, terutama karena sebagian besar mengurangi jumlah sampah rumah tangga dari sampah rumah tangga. Tapi di pengelolaan sampah yang efektif, sangat membutuhkan peran serta masyarakat hanya memberikan saran atau usul terkait pengelolaan sampah, tetapi perlu tentang kesadaran masyarakat tentang “pra-pengolahan” sampah rumah tangga atau individu (Sembiring, et al., 2018; Dongoran, et al., 2018; Sari dan Syafruddin, 2016; Santifa, dkk., 2019).

Situasi ini karena sebagian besar masalah sampah berasal dari kesalahan 'pegangan awal', yaitu genggamannya pertama setelah objek atau objek menganggapnya tidak berguna dan kemudian menjadi sia-sia. Dalam pengobatan awal, ada banyak anggota masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan atau di selokan negara. Kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah di tempat-tempat yang diberikan seringkali

menimbulkan masalah, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efisien kompleks (Suyono dan Kadir, 2014).

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan Hal tersebut membuat lingkungan menjadi kurang bersih dan tidak sehat. Begitu pula dengan masyarakat di lingkungannya akan menyebabkan Lingkungan di desa menjadi lingkungan yang kotor. Selanjutnya, partisipasi Masyarakat luas juga berperan dalam melestarikan lingkungan, karena ini berkaitan erat. Perlakuan pembangunan di desa Palattae berkembang pesat dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi.

Pengelolaan sampah dalam skala rumah tangga berbasis masyarakat di Indonesia , contohnya adalah :

1. Perumahan Pondok Pekayon Indah Jakarta, menjadi salah satu pantauan penilaian program Adipura tingkat nasional karena dinilai telah secara proaktif melakukan kegiatan peningkatan lingkungan, khususnya proses pembuatan kompos kawasan dan penghijauan. Kapasitas produksi kompos minimum sebesar 2.000 kg/bulan dengan menggunakan bahan baku 6.000kg sampah organik. Bahan baku yang digunakan berasal dari timbulan sampah 600 KK di 4 (empat) RW dengan laju timbulan sampah 1/3 kg/hari/KK. Biaya operasional perbulan unit pengelolaan kompos ini mencapai Rp 1.500.000. Kompos yang diproduksi dijual kemasyarakat sekitar dengan harga Rp 2.500 per 2 ( dua ) kilogram dan untuk produk daur ulang dengan kisaran harga RP 10.000 –Rp 100.000. Warga didorong untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberikan insentif 10% dari hasil penjualan kompos.
2. Pengelolaan sampah mandiri di Surabaya banyak menggunakan keranjang ” Sakti ” Takakura. Keranjang sakti Takakura adalah suatu alat pengomposan sampah organik untuk skala rumah tangga. Yang menarik dari keranjang Takakura adalah bentuknya yang praktis , bersih dan tidak berbau, sehingga sangat aman digunakan di rumah. Keranjang



ini di sebut masyarakat sebagai keranjang sakti karena kemampuannya mengolah sampah organik sangat baik. Keranjang Takakura dirancang untuk mengolah sampah organik di rumah tangga. Sampah organik setelah dipisahkan dari sampah lainnya, diolah dengan memasukkan sampah organik tersebut ke dalam keranjang sakti Takakura.

Penelitian lain yang dilakukan Takakura adalah pengolahan sampah pasar menjadi kompos. Akan tetapi Takakura Home Method adalah sistem pengomposan yang paling dikenal dan paling disukai masyarakat karena kepraktisannya. Keberhasilan Mr.Takakura menemukan sistem kompos yang praktis tidak saja memberikan sumbangsih bagi teknologi penguraian sampah organik, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pengelolaan sampah berbasis komunitas. Mr. Takakura jauh-jauh datang dari Jepang meneliti dan melakukan pengomposan di Surabaya.Maka pengurangan sampah organik di sumbernya, kini sangat membanggakan Surabaya.

3. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang dilakukan di sebuah kawasan di Permata Cimahi telah memakai peralatan yang disebut "*insinerator*". Insinerator adalah alat pembakar sampah yang rendah kadar polusi asapnya. Masyarakat di area ini mengelola sampahnya dengan bantuan insinerator. Warga tak lagi terbebani biaya angkot sampah atau mencium bau busuk dan menyaksikan gunungan sampah. Tiap warga tinggal menyimpan sampah yang dikemas kantong plastik di depan pagar rumah. Petugas sampah akan mengangkutnya dengan grobak, lantas mengirimkannya ke tempat pembuangan yang telah ditentukan. Di tempat pembuangan, seorang petugas akan memasukkannya ke bak insinerator. Sampah itu dibakar. Sampah pun tak mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup warga. Penyelesaian sampah seperti itu memerlukan manajemen pengolahan sampah yang tepat. Sampah bukan merupakan persoalan pemerintah semata, tetapi menjadi masalah kita semua. Untuk itu

perlu kesadaran dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.( sumber : <http://www.pusdakota.org> ).

Volume timbulan sampah di Kota Pringsewu setiap harinya berkisar antara 4000m<sup>3</sup> /hari, sedangkan yang dapat diangkut ke TPA sebesar 2600 m<sup>3</sup> /hari. Hal ini menunjukkan terjadi ketidakefisien dalam pengangkutan sampah. Secara teknis operasional faktor penyebabnya antara lain diduga karena kekurangan armada pengangkut, timbulnya hambatan samping di perjalanan dan belum adanya rute - rute yang pasti secara terjadwal dalam truk-truk sampah mengangkut dari TPS ke TPA.

Terdapat dua aspek untuk menilai efektifitas waktu tempuh pengangkutan sampah. Pertama adalah kecepatan truk pengangkut sampah dengan standart 25 km/jam. Kedua adalah menghitung nilai kemampuan proses dan membandingkan waktu tempuh sesuai perhitungan antara hasil perhitungan dengan metode variable pengendali dengan hasil survei.

Partisipasi memiliki pengertian yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara adil dan merata, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat terdiri dari 3 hal yaitu (1) Keadaan sosial masyarakat, (2) Kegiatan program pembangunan dan (3) Keadaan alam sekitar. Keadaan sosial meliputi pendidikan, tingkat pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial.

#### 1. Tingkat pendidikan kepada keluarga.

Faktor tingkat pendidikan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga orientasi melibatkan masyarakat dapat berjalan secara lancar. Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikannya pada kelurahan yang menjadi juara dan tidak menjadi juara berada pada katagori sedang. Namun jika dilihat

dari jumlah prosentasenya di desa/kelurahan yang menjadi juara lebih besar yaitu 52 % sedangkan di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara 48 %. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Tingkat pendapatan kepala keluarga. Dengan pendapatan yang relatif tinggi seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang layak, tetapi lebih dari itu membagi dan menyisihkannya untuk kebutuhan hidup lainnya. Komposisi responden berdasarkan tingkat pendapatan pada kelurahan yang menjadi juara dan tidak menjadi juara berada pada katagori sedang. Namun dilihat dari prosentasenya di desa/kelurahan yang menjadi juara lebih besar yaitu 56 % sedangkan di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara sebesar 61 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
3. Tingkat pengetahuan kepala keluarga.  
Pengetahuan dapat menanamkan pengertian sikap dan cara berfikir serta tingkah laku mendukung pelestarian lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah. Tingkat pengetahuan responden mengenai Undang-Undang tentang pengelolaan sampah No 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997 pada desa/kelurahan yang menjadi juara sebagian besar berada pada katagori sedang 30 orang atau 50 %, sedangkan di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara berada pada katagori rendah sebanyak 27 orang atau 45 %. Hal ini berarti bahwa tingkat pengetahuan sangat berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Dilihat dari pengaruh ketiga variable tersebut diatas menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah pengetahuan responden mengenai Undang-Undang tentang pengelolaan sampah No 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997 (Jurnal Ilmu Lingkungan, 2003).

Penelitian ini ingin mendeskripsikan mengenai Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pringsewu. Untuk mendukung hal tersebut Penulis menyajikan beberapa refrensi penelitian terdahulu yang sejenis sebagai pembanding. Adapaun penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis adalah :

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Artiningsih/2008	<i>Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)</i>	Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Sampangan untuk saat sekarang dikatakan sudah melaksanakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R, sedangkan warga Jomblang belum seluruhnya bisa menerapkan konsep pengelolaan sampah 3R karena belum semua warga ikut andil dalam pengelolaan sampah tersebut.
2.	Dwiyanto /2011	Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan prinsip 3 R dengan cara memilah sampah dapat mengurangi 70 persen volume sampah.

3.	RIBAWAYASA/ 2018	<i>TINJAUAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA RINGDIKIT KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sumber sampah yang ada di Desa Ringdikit bersumber dari sampah Rumah Tanggasebanyak 70 % / hari. Walaupun pengelolaan sampah di desa ringdikit cukup memenuhi syarat tetapi TPA di desa ringdikit masih berbahaya bagi lingkungan karena menggunakan system Open Dumping
----	---------------------	--	--

*Sumber : Diolah Peneliti, 2023.*

Sejatinya dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa aspek kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Kesamaan dapat dilihat dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah masyarakat setempat, akan tetapi juga terdapat perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti, beda penelitian terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, hal ini akan menjadi menarik untuk melihat hasil dari lokasi penelitian yang berbeda, kemudian penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah, sejauh mana partisipasi dan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa permasalahan yang diangkat menarik untuk diteliti, terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pringsewu serta serta dampak dari keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut.

Dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT (Studi di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu.)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (research question), adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan gambaran dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang telah berlajam di Kabupaten Pringsewu dan sejauh mana peran serta Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga beserta permasalahannya.
2. Untuk Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan mengidentifikasi kontribusinya dalam mengurangi volume sampah.
3. Untuk Menjelaskan upaya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan referensi untuk membuat model pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metoda pengomposan di daerah lain, dan membantu memecahkan atau mengurangi masalah sampah yang terjadi

2. Hasil penelitian ini yang tersaji dalam format ilmiah, diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang lingkungan dan sebagai penentu arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Pringsewu.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Sampah

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet,2002). Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah :

1. Sampah yang dapat membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H<sub>2</sub>S yang bersifat racun bagi tubuh.
2. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain.
3. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
4. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit reversible atau berpotensi irreversible atau sakit berat yang pulih.
5. menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.



### 2.1.1 Sumber- Sumber Sampah

Menurut Gilbert dkk.(1996), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut :

6. Sampah dari pemukiman penduduk Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
7. Sampah dari tempat – tempat umum dan perdagangan Tempat- tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat – tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa – sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng- kaleng serta sampah lainnya.
8. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah Yang dimaksud di sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
9. Sampah dari industri Dalam pengertian ini termasuk pabrik – pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain – lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa – sisa makanan, sisa bahan bangunan
10. Sampah Pertanian Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam

kehidupan sehari - hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah.

### 2.1.2 Jenis– Jenis Sampah

Jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Sampah Organik Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan – bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa – sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung , sayuran, kulit buah, daun dan ranting.
2. Sampah Anorganik Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk – produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botolplastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert dkk, 1996).

Berdasarkan Keadaan fisiknya sampah dikelompokkan atas :

1. Sampah basah (*garbage*) Sampah golongan ini merupakan sisa – sisa pengolahan atau sisa sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan timbulan hasil sisa makanan, seperti sayur mayur, yang mempunyai sifat

mudah membusuk, sifat umumnya adalah mengandung air dan cepat membusuk sehingga mudah menimbulkan bau.

2. Sampah kering (*rubbish*) Sampah golongan ini memang dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis :
  - a. Golongan sampah tak lapuk. Sampah jenis ini benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun – tahun, contohnya kaca dan mika.
  - b. Golongan sampah tak mudah lapuk. Sekalipun sulit lapuk, sampah jenis ini akan bisa lapuk perlahan – lahan secara alami. Sampah jenis ini masih bisa dipisahkan lagi atas sampah yang mudah terbakar, contohnya seperti kertas dan kayu, dan sampah tak mudah lapuk yang tidak bisa terbakar, seperti kaleng dan kawat.(Gelbert dkk., 1996).

### **2.1.3 Proses Perencanaan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat**

Perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan dimasa depan. Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan program pembangunan pengelolaan sampah. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikan arah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan dimaksud. Pada tahapan ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan melalui keaktifannya pada setiap rapat dan inisiatif diadakannya rapat, dan keterlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan masyarakat serta pengembangan terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan. Melalui interaksi dan komunikasi, perencanaan bersama dengan masyarakat membantu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, memahami situasi dan mengidentifikasi solusi bagaimana memecahkan masalah masalah yang dimaksud. Dalam konteks ini perencanaan adalah aktivitas

moral, perencanaan merupakan komunikator yang menggunakan bahasa sederhana dalam pekerjaannya agar membuat logik dari perilaku manusia. Kunci dari gagasan perencanaan dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Hadi, 2001:19) dalam M. Ribawayasa 2018.

Menurut Alexander Abe, (2001:98) dalam BM. Dwiyanto, 2011. tahapan perencanaan yang harus dilalui yaitu :

- a. Tahap pembuatan kesepakatan awal, dimaksudkan untuk menetapkan wilayah dari perencanaan, termasuk prosedur teknis yang akan diambil dalam proses perencanaan.
- b. Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang dikumpulkan di olah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam.
- c. Identifikasi daya dukung yang dimaksud dalam hal ini, daya dukung tidak harus segera diartikan dengan dana kongkrit (money, atau uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktivitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung akan sangat tergantung pada persoalan yang dihadapi, tujuan yang hendak dicapai, aktivitas yang akan datang. Pengelolaan sampah tentu tidak saja dapat di topang dengan gerakan yang hanya ditanamkan pada masyarakat. Hal tersebut di tanamkan pada pemerintah, yang juga bertanggung jawab terhadap persoalan pengolahan sampah ini.

Secara umum, pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis pengelolaan sampah terpadu 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung, mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan, maka 5 tahap pelaksanaan pekerjaan, yaitu : tahap persiapan, tahap pemilihan lokasi, tahap pengorganisasian dan

pemberdayaan masyarakat, tahap uji coba pelaksanaan pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi.

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah melakukan persiapan dengan melakukan tindakan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, terutama teknologi komposting di tingkat masyarakat. Dinas Kebersihan Kota Semarang menyusun metode dan pendekatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang meliputi antara lain; menentukan pemilihan lokasi, menentukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, serta pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat. .

#### 2. Tahap Pemilihan Lokasi

Tahap pemilihan lokasi disini merupakan awal dimulainya tahap pengumpulan data calon lokasi yang akan dipilih untuk melaksanakan program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Data data tersebut dapat diperoleh dari hasil kajian studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Retail Tata Ruang Kota (RDTRK).

#### 3. Tahap Perencanaan Teknis

Tahap perencanaan teknis adalah tahap penyusunan dokumen kerja serta melakukan pengadaan peralatan pengelolaan sampah. Peralatan prasarana dan sarana persampahan 3R(*reuse,reduce,recycle*) yang meliputi penentuan jenis dan jumlah peralatan, baik untuk pemilahan jenis sampah, pewadahan dan pengakatan.

#### 4. Tahap Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengorganisasian tentang pemberdayaan masyarakat dan stakeholder menjadi fasilitator terhadap kegiatan ditingkat komunitas / masyarakat dikawasan lokasi terpilih. Tahap ini dibagi menjadi 4 kegiatan :

melakukan identifikasi lokasi terpilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi, melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu. Kegiatan Penyusunan Program Sampah 3R (reuse, reduce, recycle) adalah proses penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan pola 3R adalah: membuat identifikasi permasalahan dan menentukan rumusan permasalahan serta menentukan kebutuhan yang dilakukan dengan metode penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan survei kampung sendiri dan menyusun analisis permasalahan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan serta menentukan potensi sumber daya setempat. Kegiatan Menyusun Identifikasi Kebutuhan peralatan Prasarana dan Sarana persampahan 3R (reuse, reduce, recycle) yaitu menentukan jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, pewadahan, pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos

5. Tahap Evaluasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R. Tahap evaluasi ini merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat . Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan pengontrolan secara intensif serta sebagai upaya untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.

#### **2.1.4 Aspek Pengelolaan Sampah**

Sistem Pengolahan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek/komponen yang saling mendukung dimana antara satu dengan lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan (SNI 19-2454-2002).

Kelima aspek tersebut meliputi:

1. Aspek teknis operasional
2. Aspek kelembagaan
3. Aspek hukum dan peraturan
4. Aspek pembiayaan
5. Aspek peran serta masyarakat.

### 1. Aspek Teknis Operasional

Aspek teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi dasardasar perencanaan untuk kegiatan-kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir. Keterkaitan antar sub sistim dalam pengelolaan sampah dilihat pada

**Gambar 2. Teknis Operasional Pengelolaan Sampah**



Tata cara pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu : penampungan / pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan/pengolahan.

#### 1. Penampungan Sampah/ Pewadahan

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut

dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan (SNI 19-2454-2002).

Bahan wadah yang dipersyaratkan sesuai Standart Nasional Indonesia adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat dan mudah dikosongkan. Sedangkan menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), persyaratan bahan wadah adalah awet dan tahan air, mudah diperbaiki, ringan dan mudah diangkat serta ekonomis, mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat.

## 2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan / pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu : pola individual dan pola komunal (SNI 19-2454-2002) sebagai berikut :

- a. Pola Individual Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ketempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA.



**Gambar 3. Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung**

- b. Pola Komunal Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.



**Gambar 4. Pola Pengumpulan Sampah Komunal**



### 3. Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut (SNI 19-2454- 2002).

### 4. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres (SNI 19-2454-2002)

### 5. Pembuangan Akhir Sampah

Tempat pembuangan sampah akhir (TPA) adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. Tempat menyingkirkan sampah kota sehingga aman (SK SNI T-11-1991-03). Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir merupakan tempat pengolahan sampah.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu : *Open Dumping, Sanitary Landfill, Controlled Landfill*.

#### a. *Open Dumping Metode*

open dumping ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang / menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada

perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem open dumping menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

*b. Sanitary Landfill Metode*

pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

*c. Controlled Landfill Metode*

controlled landfill adalah *sistem open dumping* yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang di padatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

## **2. Aspek Kelembagaan**

Organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial budaya dan kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang ditetapkan, kapasitas kerja sistem dan lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani (Rahardyan dan Widagdo, 2005).

Menurut Syafrudin dan Priyambada (2001), bentuk kelembagaan pengelola sampah disesuaikan dengan katagori kota. Adapun bentuk kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut :Kota Raya dan Kota Besar (jumlah penduduk > 500.000 jiwa) bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.

1. Kota sedang 1 (jumlah penduduk 250.000 – 500.000 jiwa) atau Ibu Kota Propinsi bentuk lembaga pengelola sampah yang dianjurkan berupa dinas sendiri.

2. Kota sedang 2 (jumlah penduduk 100.000 – 250.000 jiwa) atau Kota/Kotif bentuk lembaga yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas /UPTD Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.
3. Kota kecil (jumlah penduduk 20.000 – 100.000 jiwa) atau kota kotif bentuk lembaga pengelolaan sampah yang dianjurkan berupa dinas / suku dinas / UPTD, Dinas Pekerjaan Umum atau seksi pada Dinas Pekerjaan Umum.

### **3. Aspek Hukum dan Peraturan**

Hukum dan peraturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Manajemen persampahan kota di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, keterlibatan masyarakat. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pringsewu baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun keputusan Wali Kota Pringsewu sebagai berikut :

1. Peraturan daerah kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Perda ini menjabarkan ketentuan ,Dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan; 2. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

#### **4. Aspek Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar pada roda sistem pengelolaan persampahan di kota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sistem pengolahan persampahan di Indonesia lebih di arahkan kesistem pembiayaan sendiri termasuk membentuk perusahaan daerah. Masalah umum yang sering dijumpai dalam sub sistem pembiayaan adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional, dana pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas, kewenangan dan struktur organisasi yang ada tidak berhak mengelola dana sendiri dan penyusunan tarif retribusi tidak didasarkan metode yang benar. Menurut Raharyan dan Widagdo,(2005) dalam M. Ribawaysa, 2018. peraturan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah mengatur tentang :

1. ketertiban umum yang terkait dengan penanganan persampahan
2. rencana induk pengelolaan sampah kota
3. bentuk lembaga organisasi pengelolaan
4. tata cara penyelenggaraan pengelolaan
5. tarif jasa pelayanan atau retribusi
6. kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan pihak swasta.

#### **5. Aspek Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang

kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat Wibowo dan Djajawinata (2004).

Menurut Hadi (1995:75) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai :

1. Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
2. Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik.
3. Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan concern masyarakat.
4. Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsensus.

### **2.1.5 Dampak Negatif Sampah**

Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi ( refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Menurut Gelbert dkk (1996) ada tiga dampak sampah terhadap manusia :

1. Dampak Terhadap Kesehatan Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut :
  - Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.

- Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
  - Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.
2. Dampak Terhadap Lingkungan Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.
  3. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut :
    - a) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit).
    - b) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

## 2.2 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat

Pasal 16 Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, yaitu berbunyi tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan limbah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat secara total dalam lima sub sistem pengelolaan sampah, yang meliputi sub sistem

kelembagaan, sub sistem teknis operasional, sub sistem finansial, sub sistem hukum dan peraturan serta sub sistem peran serta masyarakat.

Menurut Syafrudin (2004) dalam Artiningsih 2008, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (Reuse, Recycling, Recovery, Replacing dan Refilling). Kedua program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga kelokasi TPA.

Seluruh sub sistem didalam sistem harus dipandang sebagai suatu sistem yang memerlukan keterpaduan didalam pelaksanaannya. Sistem pengelolaan sampah terpadu ( Integrated Solid Waste management ) didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan program teknologi dan manajemen untuk mencapai sistem yang tinggi, dengan hirarki sebagai berikut (Tchobanoglous, 1993 dalam Syafrudin, 2004 ).

1. Source Reduction, yaitu proses minimalis sampah di sumber dalam hal kuantitas timbulan dan kualitas timbulan sampah, terutama reduksi sampah berbahaya.
2. Recycling, yaitu proses daur ulang yang berfungsi untuk mereduksi kebutuhan sumberdaya dan reduksi kuantitas sampah ke TPA.
3. Waste Transformation, yaitu proses perubahan fisik, kimia dan biologis perubahan sampah. Dimana ketiga komponen itu akan menentukan :
4. perubahan tingkat efisiensi yang diperlukan didalam sistem pengelolaan.
5. Perlunya proses reduce, reuse, dan recycle sampah.
6. Proses yang dapat menghasilkan barang lain yang bermanfaat seperti pengomposan.
7. *Landfilling*, sebagai akhir dari suatu pengelolaan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Pemilihan dan penerapan teknologi dalam kontek ini tentunya dilakukan sehingga terpilih teknologi tepat guna. di dalam operasional sistem

pengelolaan sampah, pendekatan yang tepat adalah pendekatan sistem pemanfaatan terpadu.

### 2.3 Pengertian Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R

Menurut Departemen Pekerjaan Umum Kota Semarang (2008), pengertian pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, melalui program menggunakan kembali (*Reuse*), mengurangi (*Reduce*), dan mendaur ulang (*Recycle*).

2.3.1 *Reuse* (menggunakan kembali) yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.

2.3.2 *Reduce* (mengurangi) yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.

2.3.3 *Recycle* (mendaur ulang) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Mengurangi sampah dari sumber timbulan, di perlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah ( dari hulu ) adalah menerapkan prinsip 3R. Sesuai petunjuk teknis nomor CT/Rc-TC/001/98 atau pendekatan prinsip produksi sampah sebagaimana dikemukakan oleh Winarno dkk, (1995) dalam Dwiyanto 2001. Tindakan yang bisa dilakukan untuk setiap sumber sampah adalah sebagai berikut:

#### **a. Rumah Tangga, tindakan yang bisa dilakukan adalah :**

1. Mengurangi ( *Reduce* ), melalui tindakan :

- a) Menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- b) Menggunakan produk yang bisa di isi ulang, misalnya penggunaan lahan pencuci yang menggunakan wadah isi ulang.
- c) Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, misalnya penggunaan tisu dapat dikurangi, menggantinya dengan serbet atau sapu tangan.

2. Menggunakan Kembali (*Reuse*), melalui tindakan :



- a) Gunakan kembali wadah/ kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya, misalnya penggunaan botol bekas untuk wadah minyak goreng hasil home industri minyak kelapa atau wadah untuk madu lebah.
- b) Gunakan wadah atau kantong yang dapat digunakan berulang ulang misalnya, wadah untuk belanja kebutuhan pokok yang terbuat dari bahan yang tahan lama sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama.

3. Daur ulang (*Recycle*), melalui tindakan :

- a) Pilih produk atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai.
- b) Lakukan penggunaan sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada atau memanfaatkan sesuai kreaktifitas masing-masing.
- c) Lakukan penanganan untuk sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat.

**b. Fasilitas Umum ( perkantoran, sekolah )**

1. Mengurangi ( *Reduce* ) produksi sampah dengan cara :

- a) Penggunaan kedua sisi kertas dan spasi yang tepat untuk penulisan dan foto copy.
- b) Penggunaan alat tulis yang bisa di isi kembali.
- c) Sediakan jaringan informasi dengan komputer ( tanpa kertas ).
- d) Gunakan produk yang dapat di isi ulang.
- e) Hindari bahan yang sekali pakai.
- f) Hindari penggunaan bahan dari plastik dalam penjilidan laporan – laporan.

2. Menggunakan kembali ( *reuse* ), melalui tindakan :

- a) Gunakan alat kantor yang bisa digunakan berulang kali.

- b) Gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat di apus dan di tulis kembali.

### c. Daerah Komersil

#### 1. Mengurangi (*reduce*), melalui tindakan:

- a) Memberikan intensif oleh produsen bagi pembeli yang mengembalikan kemasan yang dapat digunakan kembali.
- b) Memberikan kemasan/ pembungkus hanya kepada produk yang benar-benar memerlukannya.
- c) Sediakan produk yang kemasannya tidak menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- d) Sediakan pembungkus/ kemasan yang mudah terurai.

#### 2. Menggunakan Kembali (*reuse*)

- a) Gunakan sampah yang masih dapat di manfaatkan untuk produk lain.
- b) Sediakan perlengkapan untuk pengisian kembali produk umum isi ulang (minyak, minuman).

## 2.4 Teori Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai artipemain sandiwara (film), tukang lawak ada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukandimasyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) yaitu: peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu jabatan tertentu. Kepribadian juga mempengaruhi bagaimana peran itu dijalankan. (Hayati, 2021). Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984:237)

Setiap manusia dalam kehidupannya memiliki peran dan fungsi masing - masing dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan peranannya setiap manusia memiliki sikap atau tindakan yang berbeda - beda. Menurut Poerwadarminta, (Cahya,2017:22) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan Masyarakat.

Menurut Riyadi (Syaron, 2017:2) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tanggung jawab, tabu dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang semuanya menjalankan berbagai peran. (dalam Windasai dkk., 2001)

Dari pengertian-pengertian diatas peran merupakan sikap atau tindakan seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat yang diharapkan oleh banyak orang atau lingkungannya. Jika peran dikaitkan dengan peran pemerintah daerah yaitu peran pemerintah daerah dalam melakukan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang

melakukan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran.

#### **2.4.1 Jenis-Jenis Peran**

Mengenai peran ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) dalam (Hayati, 2021), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 2.4.1 Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- 2.4.2 Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- 2.4.3 Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
- 2.4.4 Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk menurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang nelandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- 2.4.5 Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai Upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak

percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

#### **2.4.2 Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan**

Definisi pemerintah yaitu sekelompok orang yang menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan dalam pembangunan masyarakat di wilayah pemerintahan (Ahira, 2011). Pemerintah merupakan salah satu aktor dalam pembangunan salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Aktor tersebut dapat dikelompokkan dalam empat aktor. Pertama, pembuat kebijakan yang membuat dasar kebijakan dalam setiap permasalahan infrastruktur. Kedua, pengelola infrastruktur yang menentukan kebijakan dalam pelayanan kelembagaan dan pembuat kebijakan seperti dalam hal teknologi. Ketiga, staf operator yang memahami permasalahan infrastruktur sehari-hari. Dan yang keempat adalah pengguna pelayanan infrastruktur (Fox, 1994: 10). Nishimoto (1997:10) menambahkan aktor dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah mempersiapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan memberikan pelayanan publik sebagai bentuk manajemen sektor publik.

Pemerintah dan swasta bekerja sama dalam menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang memungkinkan untuk pertumbuhan sektor swasta. Sedangkan masyarakat mencakup partisipasi pemangku kepentingan dan penerima manfaat dari kebijakan pembangunan. Dukun (2003:40) menjelaskan bahwa pemerintah masih bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah yang belum maju. Pengadaan dan pembangunan infrastruktur kini juga sudah dapat dilakukan swasta dan pihak komersial. Pemerintah tidak memerlukan anggaran bagi infrastruktur yang kini sudah dikuasai oleh pihak privat. Kewajiban pemerintah hanya menyediakan iklim dan regulasi yang kondusif, kepastian hukum bagi investor swasta nasional dan asing, serta kontrol terhadap fungsi sosial infrastruktur bagi rakyat tidak mampu.

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Hal ini menurut Soeharto (2008: 49) dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politis dimana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik. Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan.

Sedang pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan peraturan pendukungnya. Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut Fiona (2001:416) dalam Kharisma (2013), pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga donor.

Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

### **1. Pengatur Kebijakan (Regulator)**

Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Fiona (2001), Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

## **2. Penyedia Layanan (Service Provider)**

Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya dengan kebijakan yaitu salah satunya program. Menurut EPA, program yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program-program tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir.

## 2.5 Kerangka Pikir

Sampah masih menjadi permasalahan serius dalam sistem pembangunan daerah di Indonesia. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena hampir setiap kegiatan fisik yang dilakukan manusia pada akhirnya akan menimbulkan sampah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman padat penduduk. Laju pertumbuhan jumlah sampah di wilayah sekitar permukiman penduduk tidak berbanding lurus dengan upaya pengelolaan yang ramah lingkungan. Kondisi ini akan berdampak pada terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Secara lebih spesifik, akan berdampak buruk pada aspek kesehatan masyarakat. Karena itu, masalah persampahan pada permukiman penduduk perlu dikelola secara optimal. Optimalisasi pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

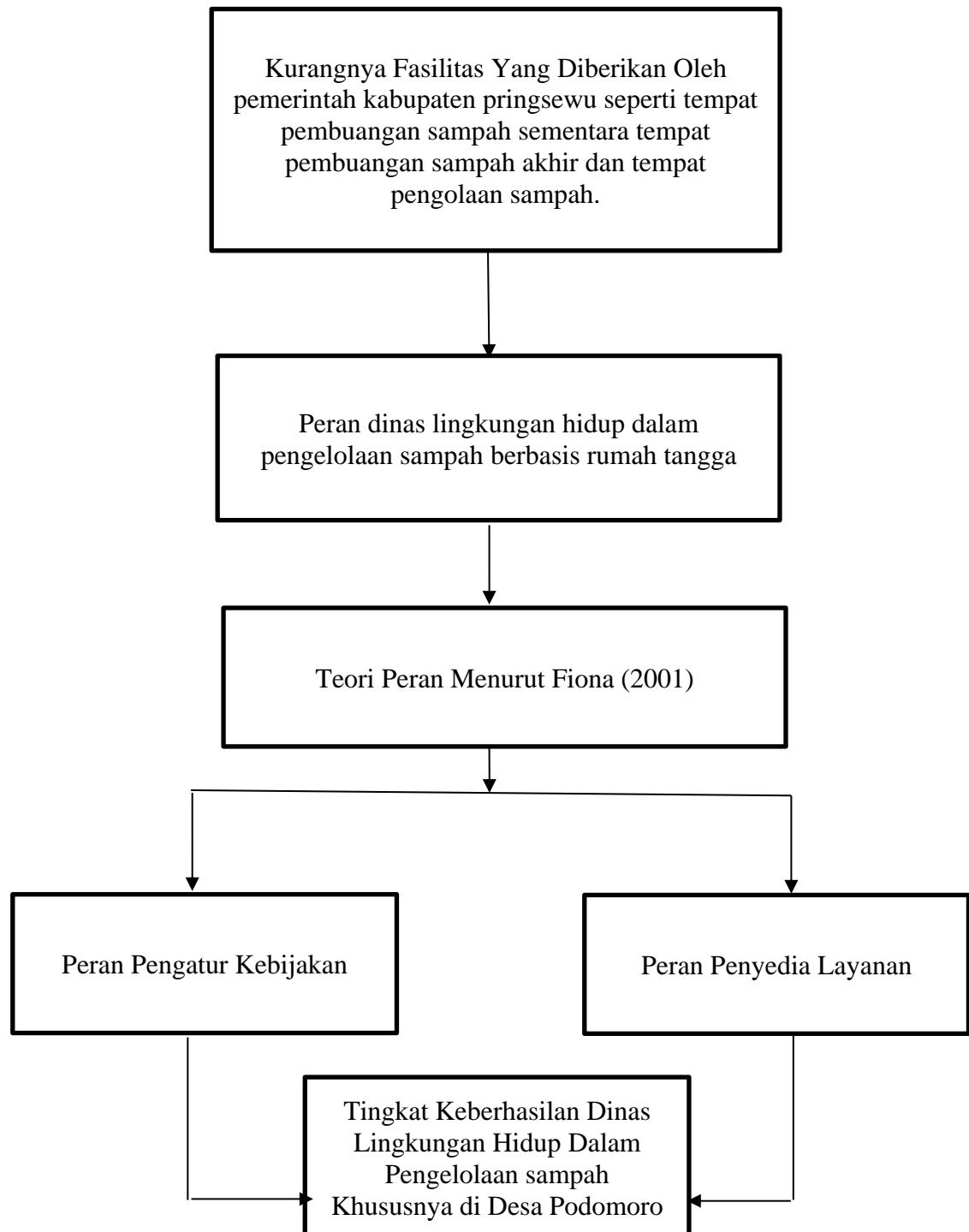
Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sesuai kewenangannya. Ketentuan ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan sampah, bahwa pengelolaan sampah dari sumber (rumah tangga) hingga ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menjadi tanggung jawab masyarakat, sementara pengelolaan sampah dari TPS hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peraturan Menteri ini memberi petunjuk bahwa baik masyarakat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai kewenangannya, termasuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan peran pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Kelurahan Podomoro serta peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah tersebut.



Untuk melaksanakan Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Fiona, 2001) bahwa Pemerintah memegang peran penting dalam pengelolaan sampah yakni sebagai regulator dan service provider. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 5. Bagan Kerangka Pikir**



Sumber : *Teori Peran Oleh Fiona (2001)*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Beberapa ahli metodologi seperti Kirk dan Miller (Moleong, 2007), mendefinisikan metode kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Kemudian sehubungan dengan pendapat di atas Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles dan Huberman mengemukakan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tujuan dari metodologi ini bukan sesuatu yang umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, maka metode yang digunakan sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni metode kualitatif, mengenai fenomena pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Pringsewu dan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif harus menetapkan fokus. Fokus penelitian yang dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik (Moleong, 2007). Fokus penelitian ini adalah pembatasan masalah dalam penelitian berisikan pokok dari masalah yang masih bersifat umum. Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka peneliti akan membatasi satu atau lebih variabel. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Podomoro Kecamatan Pringsewu Selatan. Kemudian akan di analisis berdasarkan teori peran pemerintah menurut Fina (2001) yakni sebagai regulator dan service provider dalam dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Pringsewu Lampung, Kemudian lokasi selanjutnya yakni di Kantor Desa Podomoro Jl. Nawatama No.12, Podomoro Kec Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Serta di Komplek rumah warga masyarakat Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

Adapun alasan Penulis memilih lokasi tersebut adalah karna lokasi tersebut yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten pringsewu, sehingga penentuan lokasi tersebut sesuai dengan arah dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data

dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2013). Purposive Sampling digunakan untuk mencapai keterwakilan dari setting, individu-individu dan aktivitas aktivitas yang dipilih. Alasan pemakaian teknik Purposive karena informan penelitian ini dinilai memiliki kriteria tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, pada penelitian ini informan yang dipilih adalah mereka yang dipandang cukup memahami permasalahan yang berhubungan dengan advokasi bukit yang dilaksanakan oleh Walhi dan Mitra Bentala dan orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi atau fakta terkait dengan advokasi bukit di Kota Bandar Lampung. Adapun informan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Waktu Pelaksanaan Wawancara
1.	Adam	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu	2 Juni 2023
2.	Suprio	Kepala Pekon Podomoro	11 Juni 2023
3.	Subari	Masyarakat	13 Juni 2023
4.	Jordan Manulang	Masyarakat	13 Juni 2023

*Sumber : Diolah Peneliti, 2023.*

Adapaun alasan Peneliti memilih informan di atas adalah karena informan di atas dianggap mampu memberikan jawaban dan memahami betul persoalan yang Peneliti lakukan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Desa Podomoro, Kecamatan Podomoro, Kabupaten Pringsewu.

### **3.5 Jenis Data Penelitian**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, termasuk wawancara, dan observasi pada aktivitas kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Kabupaten Pringsewu,
2. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku-buku mengenai advokasi lingkungan dan pengelolaannya, karya ilmiah, jurnal, internet, dan informasi yang diperoleh dari surat kabar lokal yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan organisasi pemerintah dan masyarakat setempat, yang dapat menjadi sebagai dokumen resmi atau dasar kegiatan penelitian.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan (Silaen dan Widiyono, 2013). Penelitian ini, melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi (Widi, 2010). Teknik observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi ikut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian dari suatu organisasi yang dari segi waktu belum lama terjadi (Silaen dan Widiyono, 2013). Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Fungsinya adalah sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi.

## 3.7 Teknik Pengolahan Data

### 1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap. Pada tahap ini, data yang tidak bernilai atau tidak relevan harus dipisahkan. Peneliti melakukan kegiatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan. Data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Pada proses editing data, Peneliti mengolah data hasil kegiatan wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada pedoman wawancara, dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan hasil observasi yaitu Peneliti mengumpulkan yang data-data menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

## 2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat narasi dan deskriptif.

Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penulisan dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten dan memiliki kapasitas serta memahami tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah

tangga berbasis masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Data dari hasil wawancara kemudian dipilih agar dapat disajikan dengan baik kemudian peneliti melakukan reduksi data kembali pada tahap pembahasan dan hasil.

## 2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan dalam proses penelitian ini. Penyajian yang sering digunakan pada penelitian kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan stimulan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Penyajian data dalam penelitian ini, Peneliti menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti menyajikan data yang telah direduksi

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek penelitian. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang sudah tercantum sebelumnya pada bagian bab pendahuluan Peneliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

### **3.9 Teknik Validasi Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang



mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data melalui proses triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data itu. Pada bagian ini peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

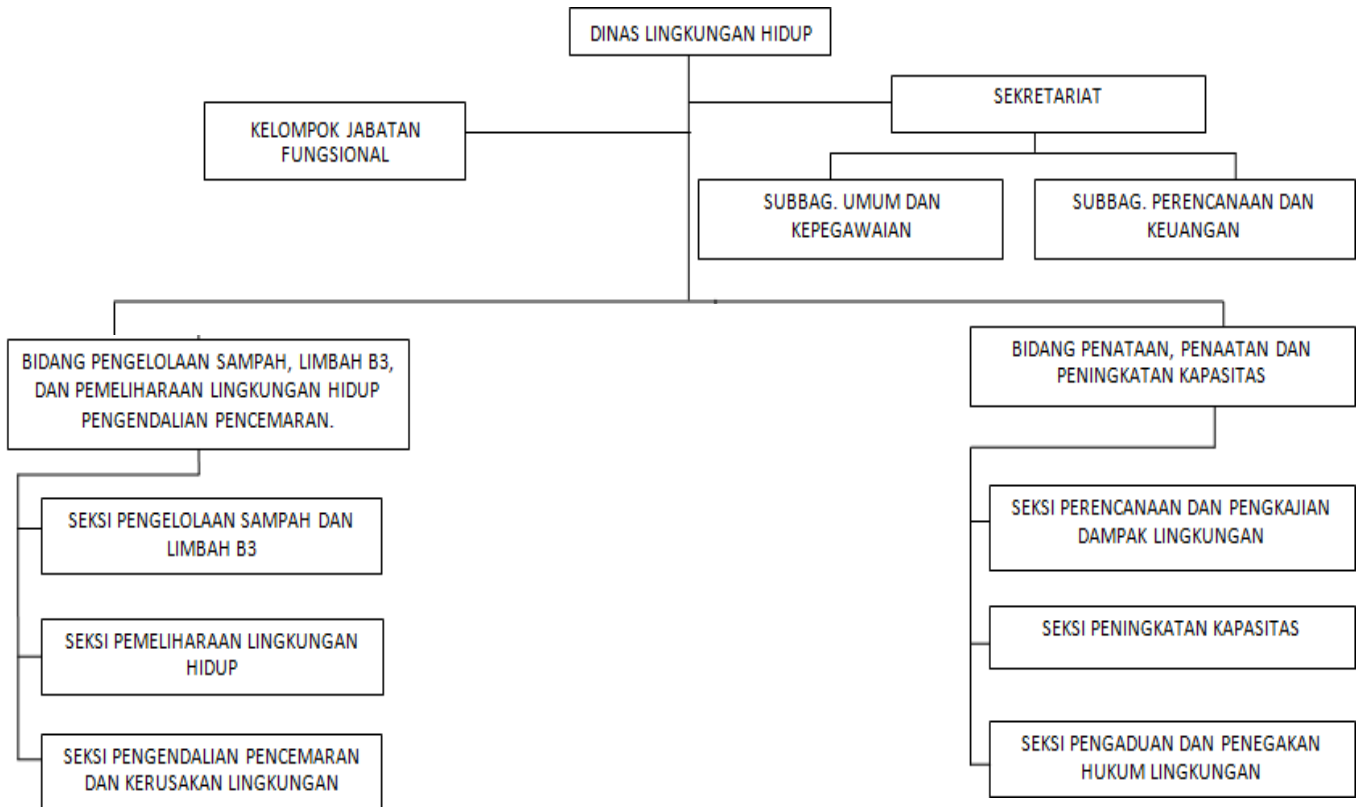
### **4.1 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu**

#### **4.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
4. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas.

**Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pringsewu**



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu memiliki Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Pemerintah Daerah. Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu meliputi :

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
9. Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup dilingkup Pemerintah Daerah;
11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

#### **4.1.2 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pengendalian Pencemaran**

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melakukan perencanaan dan penyusunan program, dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah, limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:

1. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran; dan
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.

Untuk menyelenggarakan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/ kota;
2. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
5. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. pembinaan daur ulang sampah;
7. penyediaan fasilitas daur ulang sampah;
8. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/ kota;
10. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. penyediaan sarpras penanganan sampah;
12. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

13. penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
14. pengawasan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan *control landfill*;
15. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
26. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

27. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
28. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota;
29. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
30. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
32. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
33. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagaimana bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil; dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/ modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien,

sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Keberadaan sumber daya manusia dalam mendukung tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu, sangat menentukan. Hal ini karena sumber daya manusia merupakan penentu bagi berjalannya aktivitas perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Aktivitas tersebut terutama dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen bersama yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis perangkat daerah.

Ketersediaan sumber daya manusia memberikan kontribusi penting untuk keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi, Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu didukung oleh 76 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 orang, dan Pegawai Honorer Daerah sebanyak 54 orang. Adapun keberadaan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu berdasarkan tingkat Pendidikan, dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Jumlah Pegawai di DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat			9	7	16
2	SMP Sederajat			3	3	6
3	SMA Sederajat			18	5	23
4	D3			1	2	3
5	S1	9	5	3	3	20
6	S2	5	3			8
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>76</b>

*Sumber : DLH Kabupaten Pringsewu*

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa tingkat Pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu adalah SD sederajat sebanyak 16 orang, SMP sederajat sebanyak 6 orang, SMA sederajat



sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 20 orang, dan S2 sebanyak 8 orang. Untuk melihat kondisi sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu berdasarkan golongan/ruang, kepangkatan, dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4. Data Jumlah Pegawai di DLH Berdasarkan Golongan/Ruang, Kepangkatan, dan Jenis Kelamin**

No.	Golongan/ Ruang	Kepangkatan	Jumlah Pegawai	
			Laki-Laki	Perempuan
1	IV.b	a Tingkat I	1	1
2	IV.a	Pembina	2	-
3	III.d	Penata Tingkat I	4	3
4	III.c	Penata	5	2
5	III.b	Penata Muda Tingkat I	-	-
6	III.a	Penata Muda	2	2
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>	<b>8</b>

*Sumber : DLH Kabupaten Pringsewu*

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu terdiri dari Pembina Tingkat I (IV.b) sebanyak 2 orang, Pembina (IV.a) sebanyak 2 orang, Penata Tingkat I (III.d) sebanyak 7 orang, Penata (III.c) sebanyak 7 orang, dan Penata Muda (III.a) sebanyak 4 orang.

## **4.2 Desa Podomoro**

### **4.2.1 Kondisi Desa**

Desa Podomoro adalah desa yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Pringsewu dengan topografi dataran rendah, secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Batas sebelah utara dengan Sungai Way Sekampung dan Pekon Podosari, sebelah timur Kecamatan Gadingrejo sebelah Barat Kelurahan Pringsewu Utara, dan sebelah Selatan Desa Sidoharjo dan Kelurahan Pringsewu Utara.

#### 4.2.2 Sejarah Desa

Desa Podomoro adalah suatu desa kolonisasi. Desa ini dibuka pada tahun 1927. Dahulu, wilayah Desa Podomoro masih hutan, yang pertama kali masuk adalah rombongan pendatang dari Jawa Tengah. Namun, orang-orang tersebut sebelumnya sudah bertempat tinggal di Desa Wates, Kecamatan Gading Rejo. Rombongan tersebut berjumlah sembilan Kepala Keluarga yang dibawa bersama-sama oleh Bapak Kromo Dimejo. Setelah pendatang baru bertambah banyak, maka pada waktu itu dibentuklah pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dan Kepala Desa yang pertama kali adalah Bapak Kromo Dimejo.

Pada waktu itu Desa Podomoro berasal dari bahasa Jawa yang artinya “*Podo:sama, Moro:datang*”. Jadi, Podomoro artinya “*DatangBersamaan*”. Awalnya Desa Podomoro terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Podomoro I dan Dusun Podomoro II. Setelah Desa Podomoro berdiri dan banyak pendatang baru serta oendatang tersebut menebang di sebelah utara, lalu desa bertambah dua dusun yaitu Dusun Podosari dan Dusun Podorejo. Dengan demikian Desa Podomoro terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Dusun Podomoro I, Dusun Podomoro II, Dusun Podosari dan Dusun Podorejo.

Namun, seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk, terpecahlah dua dusun milik Desa Podomoro yang pertama adalah Dusun Podorejo menjadi Desa Rejosari (2006) dan yang kedua Dusun Podosari menjadi Desa Podosari (2013) yang memiliki otonom sendiri. Kini Desa Podomoro hanya memiliki tiga dusun saja yaitu Dusun Podomoro I,II dan Dusun Podomoro III.

Berikut daftar nama orang pendatang dari Jawa Tengah yang semula tinggal di Pekon Wates Gadingerjo dan membuka Desa Podomoro yaitu :

1. Kromodimejo
2. Mat Sengat
3. Amat Toyib

4. Amat Mukim
5. Amat Danom
6. Mat Asli
7. Pogati
8. Mat Jarman
9. Wiro Semito
10. B.Tilam

Pekon Podomoro terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Pringsewu, ± 3 Km dan 56 Km dari Ibu Kota Propinsi Lampung.

Sejak berdiri Pekon Podomoro telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Pekon dengan masa jabatan yang berbeda, dengan urutan sebagai berikut :

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Kromo Dimejo         | Tahun 1927 – 1932      |
| 2. Mad Rejo             | Tahun 1933 – 1950      |
| 3. Pawiro Sukarto       | Tahun 1951 – 1957      |
| 4. Parto Darmo          | Tahun 1958 – 1961      |
| 5. Madio Utomo          | Tahun 1962 – 1964      |
| 6. Parto Darmo          | Tahun 1965 – 1967      |
| 7. D.Kamino             | Tahun 1968 – 1969      |
| 8. M.Ardani             | Tahun 1970 – 1972      |
| 9. D.Kamino             | Tahun 1973 – 1975      |
| 10. Suyono              | Tahun 1975 – 1976      |
| 11. Kasimin Murtopo     | Tahun 1976 – 1979      |
| 12. Sukiman Edy Riyanto | Tahun 1979 – 1987      |
| 13. Hadi Pramono        | Tahun 1987 – 1988      |
| 14. AS Sakeh            | Tahun 1988 – 1997      |
| 15. Margono             | Tahun 1997 – 1998      |
| 16. Narsun              | Tahun 1998 – 2006      |
| 17. Parjito             | Tahun 2006 – 2007      |
| 18. Hendry Sutarwan     | Tahun 2007 – 2013      |
| 19. Didi Maryadhi       | Tahun 2013 (Pj)        |
| 20. Hendry Sutarwan     | Tahun 2013 – 2019      |
| 21. Didi Maryadhi       | Tahun 2019 – 2020 (Pj) |

### 4.2.3 Demografi

Pekon Podomoro merupakan salah satu desa dari kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dengan Luas wilayah 253 hektar, dengan topografi dataran. Pekon Podomoro terletak di dalam wilayah Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Pekon Podosari dan Sungai Way Sekampuh
- Sebelah Timur : Pekon Bulukarto Kec. Gadingrejo
- Sebelah Selatan : Pekon Sidoharjo dan Kelurahan Pringsewu Utara
- Sebelah Barat : Kelurahan Pringsewu Utara

Iklim Pekon Podomoro, sebagaimana Desa/Pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu

**TABEL 5. JUMLAH PENDUDUK**

No	Dusun	Jml RT	Jml KK	Jumlah Jiwa		
				Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dusun I Podomoro	6	397	693	648	1341
2	Dusun II Podomoro	5	453	695	794	1489
3	Dusun III Podomoro	6	479	836	720	1556
Jumlah			1329	<b>2323</b>	<b>2063</b>	<b>4386</b>

*Sumber : Database Pekon Podomoro*

### 4.2.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Podomoro termasuk masih sangat rendah, karena kondisi ekonomi dan pemahaman akan pentingnya

pendidikan masih kurang, angka putus sekolah dasar masih cukup tinggi pada tahun-tahun sebelumnya.

Desa memiliki Empat SD Negeri , Satu TK, Dua PAUD dan satu MTS YKU Podomoro. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan jenjang kelulusan masyarakat yang tadinya hanya tamat SD namun kedepan minimal masyarakat lulus pada tingkat SMP dan program nasional pendidikan dasar 9 tahun di Desa Podomoro dapat tercapai 100% dan menekan angka putus sekolah pendidikan dasar.

**TABEL 6. TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Tidak Sekolah	<b>556</b>
<b>2</b>	Belum tamat	<b>1102</b>
<b>3</b>	Tidak tamat SD	<b>115</b>
<b>4</b>	Tamat SD	<b>1531</b>
<b>5</b>	Tamat SLTP	<b>836</b>
<b>6</b>	Tamat SLTA	<b>976</b>
<b>7</b>	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	<b>387</b>

*Sumber : Dokumen Pekon Podomoro*

#### **4.2.5 Kelembagaan Desa**

Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang ada yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga yang bergerak dibidang perencanaan dan pengelola kegiatan Pembangunan.
2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
3. GAPOKTAN merupakan gabungan kelompok tani yang bergerak pada kegiatan pertanian.
4. Linmas (Perlindungan Masyarakat)
5. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

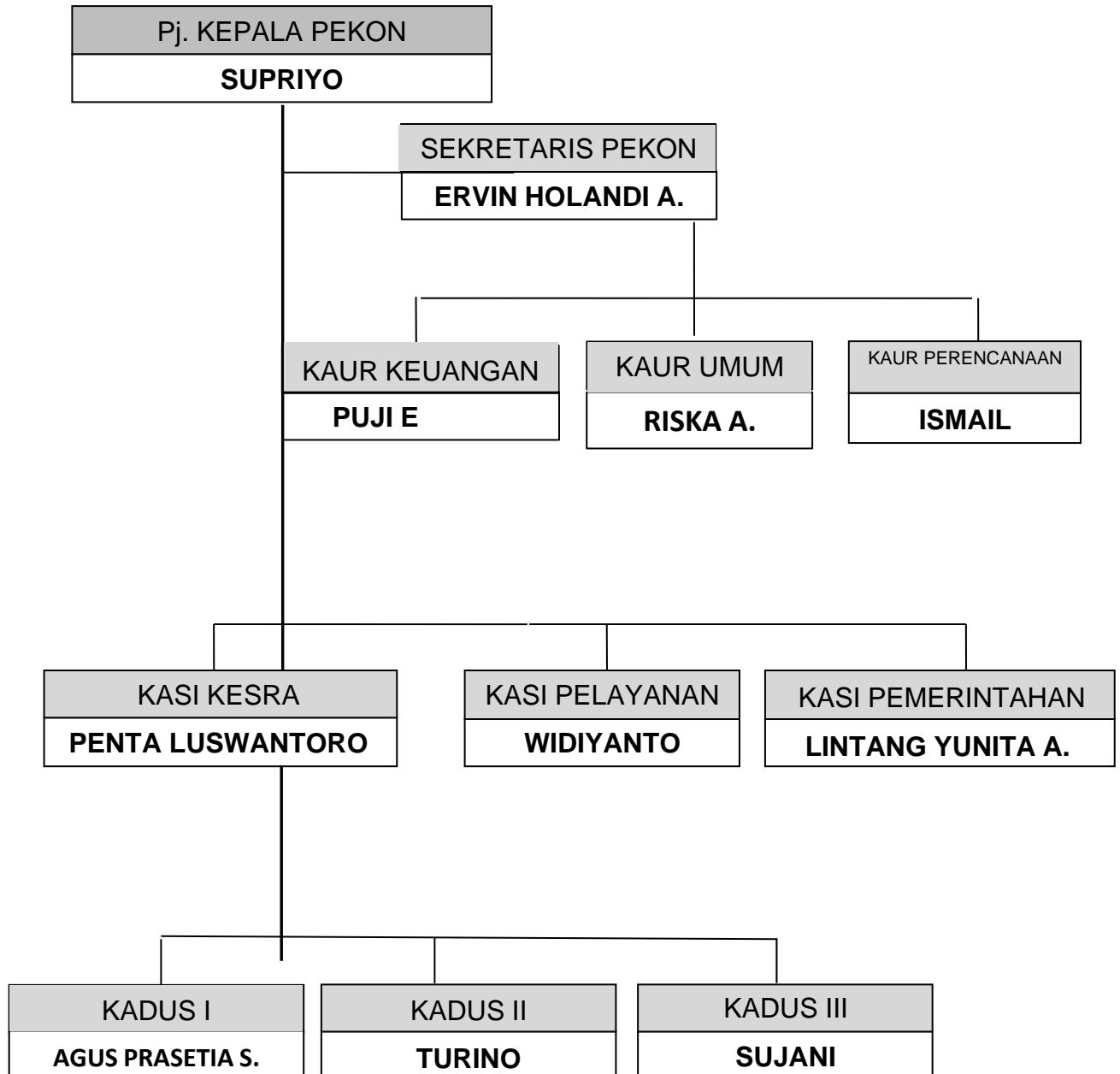
6. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
7. Karang Taruna dengan nama Taruna Karya 14 merupakan lembaga pemuda yang bergerak pada kegiatan kepemudaan dan olah raga

#### **4.2.6 Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimana mereka tinggal dan hidup. Karena sebagian besar masyarakat Podomoro mengandalkan hidup pada hasil pertanian. Ketersediaan tenaga kerja untuk Desa Podomoro masih didominasi oleh lulusan SD atau yang sederajat hal ini dapat mempengaruhi kualitas kerja dan pengalaman serta pendapatan yang rendah, oleh karena itu mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah petani, buruh tani, serta menjadi buruh diluar desa dengan penghasilan yang rendah. Dengan penghasilan yang rendah berpengaruh pada rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

## 4.2.7 Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA  
BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NO. 84 TAHUN 2015**



**Gambar 7. Struktur Organisasi Desa Podomoro**

*Sumber : Dokumen Pekon Podomoro*

**Jumlah Perangkat Desa sebanyak 9 orang terdiri dari :**

- Pj. Kepala Desa : SUPRIYO
- Sekretaris Desa : Ervin Holandi A
- Kepala Urusan Keuangan : Puji Erawati
- Kepala Urusan Umum : Riska Andirani
- Kaur. Perencanaan : Ismail
- Kepala Dusun I : Agus Prasetia Saputra
- Kepala Dusun II : Pipin Trianingsih
- Kepala Dusun III : Sujani
- Kasi. Pemerintahan : Lintang Yunita A
- Kasi. Pelayanan : Widiyanto
- Kasi. Kesra : Penta Luswantoro

### **4.3 Kabupaten Pringsewu**

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 625 km<sup>2</sup> atau hanya 1,77 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.578 jiwa/km<sup>2</sup> (Kabupaten Pringsewu Dalam Angka 2021). Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu memicu persoalan yang pelik terkait persampahan. Jumlah penduduk yang terus meningkat, telah berdampak pada semakin bertambahnya volume timbunan sampah. Kondisi ini setidaknya tercermin dari hasil *baseline* indentifikasi kumuh di wilayah Perkotaan Pringsewu yang dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018. Selanjutnya ditinjau dari timbulan sampah, pada tahun 2021 Kabupaten Pringsewu menyumbang sampah sebesar 162.73 ton per hari dan 59,396.16 ton per tahun (sipsn.menlhk.go.id, 2021).



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran sebagai Pengatur kebijakan

Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu dalam indikator Pembuat Kebijakan telah membuat kebijakan berupa Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), salah satu pelaksanaan kebijakan Kotaku di Desa Podomoro Adalah Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST, dengan Pelaksanaan Peran Pembinaan berupa Sosialisasi Bahaya dan Manfaat Sampah serta dalam Peran Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu berkerja sama dengan Aparatur Desa Podomoro.

2. Peran Penyediaan Layanan

Peran penyediaan layanan oleh dinas lingkungan hidup dalam pengolahan sampah rumah tangga berbasis masyarakat telah dilaksanakan di desa podomoro berupa Kendaraan Pengangkut Sampah berupa tiga unit kendaraan roda tiga serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

## 6.2 Saran

Adapun saran dari peneliti terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Pringsewu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi di Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. adanya dasar hukum untuk memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak tertib dalam pembuangan sampah, sehingga walaupun Dinas Lingkungan Hidup membuat pengumuman “Jangan Buang Sampah sembarangan” masyarakat tetap saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Kebanyakan masyarakat masih belum sadar akan pentingnya masalah sampah sehingga masyarakat tidak peduli, dan tetap membuang sampah disembarang tempat. Untuk itu sebenarnya perlu adanya aturan seperti peraturan daerah tentang sampah yang mencantumkan sanksi bagi yang tidak tertib, namun sampai sekarang peraturan tersebut belum dibentuk oleh pemerintah daerah.
2. Kurangnya fasilitas berupa tempat sampah sementara (TPS) yang terbatas. Sarana yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih terbatas, sehingga perlu adanya penambahan anggaran guna menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artiningsih, N. K. A. (2008). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Dinda Clasissa, DKK. Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskemas) Vol. 1, No. 1, April 2021, Hal. 62-70 Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang
- Dwiyanto, B. M. (2011). *Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan.*
- Gilbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 1996. Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan " Wall Chart ". Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang
- Hasibuan, M. F. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen (Pusat Akses Kajian Manajemen)*, 1(1), 6-20.
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).
- Huduri, A. N. A. (2018). Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Iqbal, F. Persepsi dan peran masyarakat pendatang dalam pengelolaan sampah padat domestik di Rukun Tetangga (RT) 008 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan.
- Jati, Kharisma T. Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan. *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.*
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisak, F., Pratiwi, Y. I., & Gunawan, B. (2019). *Pemanfaatan biomas sampah organik*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Pratama, R. A., & Ihsan, I. M. (2017). Peluang penguatan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah perkotaan studi kasus: bank sampah Malang. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 18(1), 112-119

Perda Edisi 3 Tahun 2016 tentang Sampah yang salah satunya mengatur tentang pengelolaan TPA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan sampah

Raharjo, S. T., & Wibowo, H. (2016). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA WISATA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG. *Prosiding KS*, 3(2).

RIBAWAYASA, M. (2018). *TINJAUAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA RINGDIKIT KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018* (Doctoral dissertation, Jurusan Kesehatan Lingkungan).

Slamet, Juli Soemirat, 2002. Kesehatan Lingkungan. Penerbit Gajah Mada. University. Press Yogyakarta.

Silaen dan Widiono. 2013. *Metodelogi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, In Media.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Windasai, W., Said, M. M. U., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793-804.